

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012-2016

ABSTRAK

Analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah kabupaten/kota berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Kinerja dari sebuah pemerintahan menunjukkan bagaimana pelaksanaan dari otonomi daerah tersebut berjalan, sehingga hal tersebut sangat penting untuk dilihat dan diukur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kabupaten Sleman berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Aktivitas, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian adalah di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Laporan APBD dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2012-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skala interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Tim Fisipol UGM, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sleman tergolong dalam kategori cukup, karena masih berada dalam skala interval 20,01 – 30,00%. Rata-rata DDF dari tahun 2012-2016 sebesar 24,34%. Rata-rata Rasio Aktivitas Belanja Pembangunan (12,27%) lebih kecil dibandingkan dengan Rasio Aktivitas Belanja Rutin (85,09%). Rasio Efektivitas PAD Efektivitas Kinerja Keuangan Kabupaten Sleman sudah sangat efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 112,77%. Rata-rata tingkat rasio efisiensi selama lima tahun terakhir menunjukkan angka 91,35%, sehingga dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Sleman kurang efisien dalam mengelola APBD dan kinerja daerah dalam memungut PAD kurang efisiensi. Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Sleman menunjukkan tingkat kemandirian dari tahun 2012-2016 yang cenderung semakin meningkat. Rata-rata tingkat rasio kemandirian daerah selama lima tahun terakhir menunjukkan angka 32,99%, sehingga dapat dikatakan konsultatif, dimana campur tangan Pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

Kata Kunci: Kinerja, Keuangan Daerah, Pengelolaan, APBD